

ANALISIS STRATEGIS KEBIJAKAN HILIRISASI MINERAL: Implikasi Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia

¹ Ferdinand Tharorogo Wau, ² Mario Andriaskiton, ³ Marselino Wau, ⁴ Jhon Firman Fau

^{1,3,4} Universitas Nias Raya, ²S.T. Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen Administrasi dan Rekayasa Teknologi

Correspondence author: ferdinand@uniraya.ac.id

^{1,3,4}Teluk Dalam, 22865, Indonesia, ²Medan, 20252, Indonesia

Abstract

Mineral downstreaming is a strategic policy aimed at increasing the value-added of mineral products and optimizing the utilization of natural resources. This policy aims to reduce the export of raw ore and increase the production of finished goods domestically, which has significant potential to secure national foreign exchange reserves and strengthen Indonesia's competitiveness in the global market. This study aims to analyze the implications and impacts of mineral downstreaming policy on the Indonesian economy. The method used is a literature review with a qualitative descriptive approach. The research findings indicate that by promoting further processing and innovation in technology development, nickel downstreaming not only has positive economic impacts through increased revenues in the non-oil and gas sector and corporate contributions to government revenues but also significantly contributes to environmental sustainability. The development of nickel downstream industries not only creates new job opportunities and reduces unemployment rates but also stimulates growth in related industries and enhances the demand for domestic technology.

Keywords: Downstreaming; Economy; Mineral

Abstrak

Hilirisasi mineral merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk mineral dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ekspor bijih mentah dan meningkatkan produksi barang jadi di dalam negeri, yang berpotensi besar untuk mengamankan cadangan devisa negara dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dan pengaruh kebijakan hilirisasi mineral terhadap perekonomian Indonesia. Metode yang digunakan merupakan *literature review* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mendorong pemrosesan lebih lanjut dan inovasi dalam pengembangan teknologi, hilirisasi nikel tidak hanya berdampak ekonomi positif melalui peningkatan pendapatan sektor non-migas dan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara, tetapi juga secara signifikan membantu dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pembangunan industri hilir nikel tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri terkait serta meningkatkan kebutuhan akan teknologi domestik.

Kata Kunci: Ekonomi; Hilirisasi; Mineral

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan. Salah satu bentuk potensi Indonesia dalam sektor pertambangan adalah mineral. Terjadi peningkatan permintaan mineral mentah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Syafira et al., 2023). Contoh nyata permintaan ini terjadi pada mineral yang berupa nikel. Nikel merupakan salah satu komoditas unggulan yang memainkan peran vital dalam perekonomian nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan global terhadap nikel meningkat tajam seiring dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik dan teknologi baterai (Suryanto, 2022).

Menurut laporan *United States Geological Survey* pada tahun 2020, produksi nikel yang mampu dihasilkan oleh Indonesia mencapai 760.000 ton nikel dari keseluruhan total 21.000.000 ton cadangan nikel yang dimilikinya. Hal ini menjadikan Indonesia negara terbesar yang memproduksi dan mengekspor nikel terbesar. Disamping bijih nikel, Indonesia juga memproduksi nikel setengah jadi, seperti feronikel, NPI (*Nickel Pig Iron*), dan *matte nickel*. Produk-produk olahan ini menjadi primadona ekspor untuk negara-negara di dunia sebagaimana dalam tabel di bawah (USGV Gov, 2021).

	Mine production		Reserves ⁶
	2019	2020 ^a	
United States	13,500	16,000	100,000
Australia	159,000	170,000	720,000,000
Brazil	60,600	73,000	16,000,000
Canada	181,000	150,000	2,800,000
China	120,000	120,000	2,800,000
Cuba	49,200	49,000	5,500,000
Dominican Republic	56,900	47,000	NA
Indonesia	853,000	760,000	21,000,000
New Caledonia ⁵	208,000	200,000	NA
Philippines	323,000	320,000	4,800,000
Russia	279,000	280,000	6,900,000
Other countries	310,000	290,000	14,000,000
World total (rounded)	2,610,000	2,500,000	94,000,000

Gambar 1. Produksi Nikel diberbagai negara (USGV Gov, 2021)

Pada tahun 2021 terjadi permasalahan ekspor bijih nikel Indonesia yang diakibatkan oleh larangan ekspor nikel yang berupa *rare material*. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi mineral di dalam negeri (Azis & Abrianti, 2021). Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini menetapkan larangan ekspor mineral mentah sebagai bagian dari upaya untuk mendorong hilirisasi atau pemrosesan lebih lanjut dari mineral di dalam negeri. Perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melakukan pemurnian atau pengolahan mineral di dalam negeri sebelum diekspor, sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang dan memperkuat kedaulatan ekonomi

nasional. Larangan ini bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya dalam Indonesia serta melindungi keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi eksploitasi bijih mentah. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas nikel dengan memprosesnya menjadi produk setengah jadi atau jadi di dalam negeri, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan memperkuat industri nasional (Giansi, 2018).

Kebijakan ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan negara-negara yang tergantung pada bijih nikel Indonesia, khususnya Uni Eropa. Uni Eropa (UE) merasa kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang diterapkan oleh Indonesia, seperti bijih nikel, bersifat diskriminatif dan merugikan industri baja mereka. Uni Eropa percaya bahwa kebijakan ini menghambat akses mereka terhadap bahan baku penting seperti nikel, besi, dan kromium yang dibutuhkan untuk produksi baja. Mereka juga mengkritik bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), khususnya dalam hal memberikan akses yang adil bagi perdagangan internasional, seperti yang diatur dalam Pasal XI:1 dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Pasal ini menegaskan prinsip keterbukaan pasar dan larangan atas pembatasan ekspor yang tidak adil atau diskriminatif. Jika Indonesia terbukti bersalah, Indonesia dapat dikenai hukuman dan dipaksa membuka kembali perdagangan *rare material* nikel (Prasetya & Hamka, 2023).

Program Hilirisasi Mineral yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia sangatlah penting dan strategis dalam mewujudkan *value added* barang mentah. Perubahan orientasi dari barang mentah menjadi produk nikel rafinasi atau produk setengah jadi lainnya, Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya secara lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar melalui peningkatan devisa negara dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga akan menguatkan industri-industri lokal.

Sebelumnya, Nugroho (2022) menunjukkan bahwa larangan ekspor bahan mentah sukses menghalau kegiatan ekspor material mentah di Indonesia. Ini berarti bahwa kebijakan tersebut efektif dalam mengurangi ekspor bahan mentah dan mendorong pemrosesan lebih lanjut di dalam negeri. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas nikel, serta memberikan manfaat ekonomi lebih besar melalui pemrosesan tambahan di dalam negeri. Setiawan & Setiawina (2019) menemukan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang lemah dalam ekspor industri nikel dibandingkan dengan negara-negara pesaing lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan posisi kompetitifnya, Indonesia perlu fokus pada peningkatan beberapa faktor produksi kunci seperti infrastruktur yang memadai, teknologi yang mutakhir, dan pengembangan sumber daya manusia yang

terampil dan terlatih. Dengan melakukan peningkatan pada aspek-aspek tersebut, Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih kompetitif dalam mengolah nikel menjadi produk setengah jadi atau jadi. Hal ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, tetapi juga akan meningkatkan nilai tambah ekonomi secara keseluruhan bagi negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis strategis terhadap kebijakan hilirisasi mineral, serta mengidentifikasi implikasi ekonominya terhadap perekonomian Indonesia. Dengan menggunakan metode *literature review*, penelitian ini bertujuan untuk menyusun dan mengevaluasi berbagai kajian dan penelitian terdahulu yang relevan mengenai kebijakan hilirisasi mineral dan dampaknya. Fokus utama adalah untuk mengumpulkan bukti empiris dan teoritis yang mendukung efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, memperkuat sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *literature review*. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis bukti-bukti dari berbagai literatur yang relevan tentang kebijakan hilirisasi mineral, khususnya dalam konteks industri pertambangan (Aulia Suhada, 2024). Pendekatan ini juga melibatkan beberapa tahapan untuk menggambarkan kondisi yang ada berdasarkan bahan-bahan yang diteliti serta menyimpulkan temuan yang relevan. Pertama, penelitian akan dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur terkait kebijakan hilirisasi mineral dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Selanjutnya, data-data ini akan dianalisis secara rinci untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan serta hasilnya dalam konteks ekonomi. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana kebijakan hilirisasi mineral mempengaruhi nilai tambah industri, lapangan kerja, dan ketergantungan ekspor bahan mentah. Data untuk *literature review* diperoleh dari berbagai sumber literatur akademik dan non-akademik yang terkait dengan topik penelitian. Beberapa sumber data yang umum digunakan dalam *literature review* meliputi artikel ilmiah, buku, dan dokumen yang terkait lainnya (Mekarisce, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara oleh (Deddy & Adriyanto, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT, dimana terdiri dari analisis aspek internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta aspek eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman suatu kebijakan atau strategi. Penelitian ini memaparkan bahwa Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel untuk melindungi cadangan dalam negeri. Langkah ini bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bahan baku yang vital, mengingat nikel mentah merupakan sumber daya tidak terbarui dan penting untuk industri. Larangan ekspor bijih nikel diklaim memiliki dampak positif dan signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia. Dengan membatasi ekspor bijih nikel, Indonesia berpotensi meningkatkan nilai ekspor dan mengamankan cadangan devisa negara. Kebijakan ini juga diyakini dapat menurunkan tingkat pengangguran, mengingat industri hilirisasi mineral dan pengolahan nikel rafinasi dapat menciptakan lapangan kerja baru di dalam negeri. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya alam strategis seperti bijih nikel, sambil mengoptimalkan manfaat ekonomi domestik melalui hilirisasi dan pengolahan lebih lanjut di dalam negeri.

2. Strategi Penegakan Kebijakan Hilirisasi Nikel Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Domestik dan Kemandirian Industri Pertahanan oleh Jupriyanto et al. (2023).

Penelitian Jupriyanto et al. (2023) bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan dan perwujudan industri pertahanan yang mandiri dengan adanya kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengatur serangkaian ketentuan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, serta regulasi turunannya, sebagai langkah konkret untuk mendukung hilirisasi hasil tambang dan memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri. Inovasi dalam industri pertahanan, seperti pengembangan kendaraan tempur berteknologi baterai, juga menjadi bukti strategi hilirisasi yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Data yang dipakai untuk menganalisis permasalahan penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama Kodam Bukit Barisan. Disamping itu, data sekunder yang digunakan mencakup literatur dari buku, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, peraturan menteri, dan sumber-sumber lain yang memiliki kredibilitas seperti jurnal ilmiah dan media elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi memiliki dampak positif terhadap kebutuhan dan inovasi dalam negeri, terutama dalam industri pertahanan. Contohnya adalah pengembangan kendaraan listrik oleh Badan Usaha Milik Negara industri pertahanan seperti PT. PINDAD. Strategi lain yang dilakukan untuk mendukung

kebijakan hilirisasi adalah melibatkan partisipasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga objek vital nasional. Strategi ini menekankan pada upaya TNI dalam mendukung keamanan dan ketahanan nasional, termasuk menjaga keamanan di sektor pertambangan, terutama tambang-tambang nikel yang krusial untuk industri dalam negeri. Keterlibatan TNI bertujuan untuk memastikan bahwa operasi pertambangan berjalan lancar, aman, dan terlindungi dari gangguan yang dapat mengganggu keberlanjutan produksi mineral serta pelaksanaan kebijakan hilirisasi secara keseluruhan.

3. Implikasi Kebijakan Larangan Ekspor Pertambangan Bijih Nikel terhadap Perekonomian di Indonesia oleh (Mokodongan & Nggilu, 2024).

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* untuk menggambarkan implikasi kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan larangan ekspor bijih nikel mentah dengan tujuan utama membangun industri nikel yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir. Keputusan ini didorong oleh visi Presiden Jokowi untuk meningkatkan daya saing produk nikel Indonesia di pasar global melalui pembangunan smelter dan produksi produk turunan di dalam negeri. Ideologi ekonomi nasionalisme mendorong upaya ini untuk menciptakan nilai tambah lebih besar dari sumber daya alam Indonesia. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi signifikan, termasuk penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan negara, dan pengembangan industri yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini juga menjabarkan dampak positif dan negatif dengan adanya kebijakan ini. Adapun dampak positif yang dirasakan adalah pembangunan industri hilir, peningkatan inovasi teknologi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan kompetitivitas global, serta usaha peningkatan keberlanjutan sumber daya. Meskipun begitu, dampak negatif yang dirasakan diantaranya adalah penurunan pendapatan dari ekspor, gangguan pada industri pengolahan, ketidakpastian investasi asing, potensi konflik perdagangan internasional, gangguan hubungan bilateral, kenaikan harga bahan baku lokal, reduksi persaingan global. Kebijakan larangan ekspor ini juga harus diimplementasikan dengan hati-hati agar tidak berdampak negatif pada perekonomian nasional, termasuk mengantisipasi gangguan terhadap rantai pasok industri yang terkait dengan bijih nikel mentah. Upaya untuk memitigasi dampak negatif ini penting agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia dalam jangka panjang.

4. Hilirisasi Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup di Indonesia Oleh Ilahi (2022).

Penelitian Ilahi (2022) menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual, yang mengacu pada bahan hukum untuk menganalisis dan mengembangkan strategi

implementasi hilirisasi yang dapat berjalan seiring dengan aspek ekonomi dan lingkungan hidup. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan hilirisasi dalam industri pertambangan, khususnya dalam konteks pengolahan mineral menjadi produk jadi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memperkuat kewajiban untuk melakukan hilirisasi nilai tambah mineral, seperti tembaga, sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pertambangan Indonesia. Namun, penerapan hilirisasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara pengimpor mineral lainnya. Tantangan utama meliputi hubungan untung-rugi yang kompleks dan pengelolaan yang mempengaruhi harga akhir produk yang ditawarkan. Kendala lainnya termasuk dalam mencapai hilirisasi produk pertambangan ini adalah manajemen yang tepat dari proses hilirisasi tanpa mengurangi tingkat konsumsi hasil tambang yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hilirisasi harus dilakukan tanpa kompromi, karena hal ini menjadi faktor penting dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Adanya hilirisasi dapat mendorong peningkatan pendapatan sektor ekonomi sembari tetap menjaga keberlangsungan kelestarian alam. Tanpa terobosan yang berani dan upaya konkret dalam penerapan hilirisasi, Indonesia dapat menghadapi konsekuensi serius dalam bidang pertambangan dan lingkungan hidup, termasuk kerusakan yang signifikan terhadap kekayaan alam yang tidak bisa dipulihkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang untuk menjaga harmonisasi antara aspek ekonomis, lingkungan hidup, dan keberlanjutan dalam implementasi hilirisasi produk pertambangan di Indonesia.

5. Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel Terhadap Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Minerba) oleh Ashar et al. (2024).

Penelitian Ashar (2024) menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis program hilirisasi nikel. Penelitian mengandalkan data dan informasi dari literatur kepustakaan, yang mencakup berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya. Hilirisasi nikel bukan hanya tentang pengolahan lebih lanjut bahan mentah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemandirian industri dalam negeri dan kontribusi sektor pertambangan terhadap kesejahteraan ekonomi nasional. Penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel mendorong perusahaan pertambangan untuk melakukan pemrosesan lebih lanjut dan produksi barang jadi di dalam negeri. Hal ini meningkatkan kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap iuran tetap yang harus dibayar kepada pemerintah. Selain itu, dengan melakukan hilirisasi, nilai tambah dari produk nikel juga meningkat. Peningkatan nilai tambah ini berdampak langsung pada besarnya royalti

yang harus dibayar kepada pemerintah atas eksploitasi sumber daya alam nikel di Indonesia. Meningkatnya produksi baterai lithium-ion yang merupakan hasil dari hilirisasi nikel, diperkirakan pendapatan royalti nikel akan signifikan. Misalnya, target produksi baterai pada tahun 2024 dapat menambah pendapatan royalti hingga 14 miliar rupiah, menunjukkan bahwa hilirisasi nikel tidak hanya menguntungkan perusahaan tapi juga memberi dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Hilirisasi nikel dinilai sebagai strategi yang efektif dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan meningkatkan nilai tambah produk nikel dan kontribusi pendapatan negara bukan pajak, kebijakan ini mendukung upaya untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil yang ditemukan, dapat diperoleh jawaban mengenai implikasi dan pengaruh kebijakan hilirisasi mineral terhadap perekonomian di Indonesia.

Implikasi Ekonomi

Implikasi mengacu pada konsekuensi atau dampak yang terjadi sebagai hasil dari suatu kebijakan, tindakan, atau peristiwa tertentu. Implikasi berfokus pada apa yang akan terjadi atau apa yang mungkin terjadi sebagai akibat dari suatu perubahan atau keputusan. Berikut merupakan implikasi dengan adanya kebijakan hilirisasi:

1. Meningkatkan nilai ekspor dan mengamankan cadangan devisa negara. Hilirisasi mineral meningkatkan nilai tambah produk, yang dapat menghasilkan lebih banyak ekspor dan meningkatkan devisa negara dari hasil ekspor barang jadi.
2. Dengan menghasilkan produk jadi yang lebih bernilai tambah, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global, memperkuat posisi sebagai produsen strategis dalam industri teknologi dan bahan baku.
3. Kebijakan hilirisasi memiliki dampak positif terhadap kebutuhan dan inovasi dalam negeri. Dengan mendorong pemrosesan lebih lanjut dan produksi barang jadi di dalam negeri, kebijakan ini merangsang inovasi dalam pengembangan teknologi dan produk.
4. Hilirisasi mineral membantu dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dengan mengurangi eksploitasi bijih mineral mentah, yang pada gilirannya mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan praktik penambangan yang berkelanjutan.
5. Peningkatan nilai tambah dan ekspor, hilirisasi mineral berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan sektor ekonomi, menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
6. Mendorong perusahaan pertambangan untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi pemrosesan di dalam negeri, yang pada gilirannya meningkatkan kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap penerimaan iuran tetap dan royalti yang harus dibayar kepada pemerintah.

Pengaruh terhadap perekonomian

Adapun pengaruh kebijakan hilirisasi yang dapat dirasakan pada sektor perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan industri hilir mineral menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2. Kebijakan hilirisasi mineral meningkatkan kontribusi perusahaan tambang terhadap iuran tetap dan royalti yang harus dibayar kepada pemerintah. Ini berarti pendapatan negara dari sektor non-migas dapat meningkat signifikan, mendukung pembangunan infrastruktur dan program pemerintah lainnya.
3. Kebijakan hilirisasi mendorong inovasi dalam pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, yang dapat merangsang pertumbuhan industri terkait dan meningkatkan kebutuhan teknologi domestik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan hilirisasi mineral memiliki implikasi dan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Secara ekonomi, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan nilai ekspor dan mengamankan cadangan devisa negara, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di pasar global dengan menghasilkan produk jadi bernilai tambah tinggi. Dengan mendorong pemrosesan lebih lanjut dan produksi barang jadi di dalam negeri, kebijakan ini merangsang inovasi dalam pengembangan teknologi dan produk domestik. Selain itu, hilirisasi mineral membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam dengan mengurangi eksploitasi bijih mineral dan mendorong praktik penambangan yang lebih berkelanjutan. Dampaknya juga terasa dalam peningkatan pendapatan sektor ekonomi secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kontribusi perusahaan tambang terhadap penerimaan negara melalui iuran tetap dan royalti. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan hilirisasi mineral tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen strategis dalam industri teknologi dan bahan baku di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar, B., Pratama, H., Hidayat, R., & Nurcahya, W. F. (2024). Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel Terhadap Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Minerba). *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 798–808.
- Aulia Suhada, D. (2024). Trend Penerapan Sistem Pakar: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Informatika*, 1(01), 12–18.

- Azis, V. A. A., & Abrianti, S. (2021). Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 3(2), 1–10.
- Deddy, M. A., & Adriyanto, A. (2023). Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2026–2032.
- Giansi, S. (2018). *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Batuan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Ilahi, A. R. (2022). Hilirisasi Pertambangan Dan Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9, 1438–1439.
- Jupriyanto, J., Deksin, G. R., Aritonang, S., & Ramadhan, M. T. (2023). Strategi Penegakan Kebijakan Hilirisasi Nikel Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Domestik Dan Kemandirian Industri Pertahanan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3305–3311.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Mokodongan, A. P., & Nggilu, T. D. G. M. (2024). IMPLIKASI KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(5).
- Nugroho, A. S. (2022). Pembatasan Sebagai Solusi Pelarangan Ekspor Bahan Baku Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 98–113.
- Prasetya, D. A., & Hamka, H. (2023). Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bijih Nikel Ke Uni Eropa (2019). *Jurnal Socia Logica*, 3(4), 1–10.
- Setiawan, I. K. D., & Setiawina, N. D. (2019). Analisis daya saing serta faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor bijih nikel di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(4).
- Suryanto, E. (2022). Apakah Nikel Indonesia Memiliki Keunggulan Daya Saing di Pasar Internasional? *Ecoplan*, 5(2), 110–119.
- Syafira, A. D., Putri, C. M., Widyarningsih, E., & Kusumawijaya, P. (2023). Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa Di Wto. *Jurnal Economina*, 2(1), 90–100.
- USGS Gov. (2021). Mineral Commodity Summaries. Retrived February 25, 2023, from <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021-nickel.pdf>